



POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PRA-KEMERDEKAAN

Abdul Rasyid Hamami¹, Muhammad Syaifuddin²

^{1,2} UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: abdulrasyidhamami@gmail.com¹, muhammadsyaifudin@gmail.com²

DOI:

| | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| Received: May 2024 | Accepted: June 2024 | Published: June 2024 |
|--------------------|---------------------|----------------------|

Abstract :

The journey of the Indonesian people throughout history is inextricably linked to the role that Muslims played, particularly in the fight to rid the land of invaders and establish Indonesia as an independent nation. Through the medium of education, Islamic authorities built Islamic education in order to fortify the religious underpinnings and provide the populace with the tools necessary to combat the educational system that the Dutch colonialists had introduced to the region. The education system that was brought over from the Netherlands is the only other formal education system other than the Islamic education system that has its own structure and management that is distinct from that system. Even though the rules imposed by the Dutch government on the operations of madrasas and Islamic boarding schools in Indonesia were so stringent and punitive, Islamic education in Indonesia was not rendered ineffective and was not thrown into disorder as a result. On the other side, the spirit of Islam was successfully kept because the clerics and clerics did not cooperate with the Dutch and they migrated away from locations that were near to the Netherlands. This allowed the spirit of Islam to be well preserved. The Islamic educational system went through something of a rough patch during the same time period as the Japanese educational establishment. In cases when the Japanese government mandates that instructors study Japanese and insists on utmost regard for the Tenno (Emperor). It has been proved that Islamic education may continue to exist in line with Islamic principles, independent of the influence of any power that is now in power, thanks to the strength of the ideals upheld by Islamic educational leaders.

Keywords: *Islamic Education Policy, Colonial Period, Colonial Pressure*

Abstrak:

Perjalanan bangsa Indonesia sepanjang sejarah tidak dapat dipisahkan dari peran yang dimainkan umat Islam, khususnya dalam perjuangan membersihkan tanah penjajah dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Melalui media pendidikan, otoritas Islam membangun pendidikan Islam untuk membentengi dasardasar agama dan membekali penduduk dengan perangkat yang diperlukan untuk melawan sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda ke wilayah tersebut. Sistem pendidikan yang dibawa dari Belanda ini merupakan satu-satunya sistem pendidikan formal selain sistem pendidikan Islam yang memiliki struktur dan manajemen tersendiri yang berbeda dari sistem tersebut. Meskipun aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda terhadap operasional madrasah dan pesantren di Indonesia begitu ketat dan menghukum, pendidikan Islam di Indonesia tidak dibuat tidak efektif dan tidak berantakan akibatnya. Di sisi lain, semangat keislaman berhasil dipertahankan

karena para ulama dan kiai tidak bekerjasama dengan Belanda dan merantau jauh dari lokasi-lokasi yang dekat dengan Belanda. Hal ini memungkinkan ruh Islam terpelihara dengan baik. Sistem pendidikan Islam mengalami masa sulit selama periode waktu yang sama dengan pendirian pendidikan Jepang. Dalam kasus ketika pemerintah Jepang mengamanatkan bahwa instruktur belajar bahasa Jepang dan bersikeras untuk menghormati Tenno (Kaisar). Terbukti bahwa pendidikan Islam dapat terus eksis sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, terlepas dari pengaruh kekuatan apapun yang kini berkuasa, berkat kekuatan cita-cita yang dijunjung tinggi oleh para tokoh pendidikan Islam.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan Islam, Periode Penjajahan, Tekanan Penjajah*

PENDAHULUAN

Umat Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia, dari perjuangan melawan kolonialisme hingga saat ini. Melihat umat Islam sebagai mayoritas penduduk, mereka memiliki kewajiban etis untuk membantu membentuk dan memperbaiki tanah air mereka. Para pemimpin Islam meletakkan dasar bagi pendidikan Islam, yang tidak diakui oleh pemerintah selama era kolonial. Di sekolah-sekolah yang dibangun oleh otoritas kolonial, pelajaran Islam tidak ditawarkan. Akibatnya, para penguasa Islam membuat ketentuan untuk pendidikan umat Islam di lembaga-lembaga agama Islam (Nasution, 1992).

Sebelum Belanda datang ke Indonesia dan membawa system sekolah modern yang diciptakan di Barat, Indonesia sudah memiliki sistem pendidikan formal yang dikenal dengan sistem pendidikan Islam.. Sistem pendidikan Islam adalah satu-satunya jenis pendidikan formal yang tersedia selama periode waktu itu. Sistem pendidikan yang dibawa Belanda sangat berbeda dengan sistem sekolah Islam. Manajemen dan organisasi sistem pendidikan Islam sepenuhnya unik berbeda dengan sekolah yang di bawa oleh belanda (Yunus, 1992)

Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat dibagi menjadi dua masa yang berbeda: masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Kedua era ini disebut sebagai "Vereenigde Oost-indische Compagnie" (VO (Nederlands Indie). Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, sistem pendidikan berpusat pada praktik komersial, khususnya konsep untung rugi. dalam hukum ekonomi. Jika seseorang menghalangi VOC untuk mencapai tujuannya, mereka tidak akan berpikir dua kali untuk berperang. Hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa salah satu anggaran dasar memiliki hak bertindak sebagai berikut: "Badan ini harus berdagang di Indonesia dan bila perlu boleh berperang." Dan harus memperhatikan agama Kristen dengan mendirikan lembaga-lembaga Pendidikan (Subhan, 2012). Hal ini berkontribusi pada stratifikasi yang ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, ada persekolahan melalui sistem pesantren yang hanya terfokus pada pelajaran agama. Di sisi lain, ada pendidikan yang mengikuti metode barat dan memiliki penekanan sekuler; jenis pendidikan ini tidak peduli dengan praktik keagamaan.

Fragmentasi sistem pendidikan Indonesia berdampak negatif terhadap perkembangan masyarakat di Indonesia. Di satu sisi, pengetahuan tentang dunia di luar Indonesia perlu didasarkan pada teknologi dan teknik terkini yang

dikembangkan oleh barat. Ini karena kita perlu tahu bagaimana dunia luar berkembang. Di sisi lain, pemahaman doktrin agama juga diperlukan, karena hal ini sudah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Perusahaan Hindia Belanda (VOC). Madrasah berkelas telah dikembangkan sebagai sarana menggabungkan dua metode pendidikan tersebut. Madrasah ini menggunakan kursi dan meja, sebuah konsep yang dipelopori oleh para pembaharu di Indonesia.

Menyusul kekalahan Belanda di Indonesia pada tahun 1942, Jepang mulai menduduki negara tersebut. Ambisi Jepang untuk dominasi regional tumbuh setelah kemenangan ini, dan negara itu mulai membangun pijakan di Asia Timur Raya. Kebijakan Jepang di bidang ini dimotivasi oleh tujuan untuk menciptakan kemakmuran di seluruh kawasan, dan tujuan utama negara tersebut adalah menempatkan dirinya di pusat kawasan berpengaruh yang meliputi Tiongkok daratan, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Rencana kemakmuran bersama Asia Raya dianggap sebagai kebutuhan mutlak untuk kepentingan upaya perang Jepang. Indonesia yang kaya akan berbagai bahan baku menjadi sasaran yang harus didorong dan dimanfaatkan seefektif mungkin secara manusiawi. Oleh karena itu, Jepang menginvasi Indonesia untuk mendapatkan akses ke sumber daya tersebut. Hal ini berdampak signifikan terhadap jalannya perang di Pasifik, dan sejalan dengan tujuan politik Jepang untuk memperluas wilayahnya (Zuhairini et al, 1995).

METODE

Karya tulis ini merupakan produk penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif jenis penelitian kepustakaan dengan strategi deskriptif. Dalam melakukan penelitian di perpustakaan, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Salah satu faktor tersebut adalah penggunaan pengetahuan yang berasal dari teks atau data numerik, bukan dari apa yang dialami di lapangan; Selain itu, peneliti biasanya tidak terjun langsung ke lapangan. Selain itu, sumber data yang bermanfaat bagi peneliti adalah perpustakaan fisik serta situs internet, Selain itu, data yang telah digunakan dapat menjadi sumber pengetahuan yang sangat berguna. Untuk mendapatkan data, pertama-tama peneliti harus menyelidiki dan mengevaluasi jumlah informasi dan teori yang telah disajikan oleh para ahli. Informasi dan teori tersebut dapat ditemukan pada koleksi dan arsip perpustakaan berupa buku, artikel jurnal penelitian, majalah, dan beberapa sumber dari internet serta sumber lain yang dianggap sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. (Basuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda

Pendudukan Jan Pieter Coen di Jakarta pada tahun 1619 M menandai dimulainya upaya kolonial Belanda di Indonesia. Upaya ini ditentang oleh Sultan Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Islam Sayidin Panotogomo. Menurut Zuhairini et al (1995), pada masa pemerintahan Sultan, penanggalan tahun tersebut digabungkan dengan tahun Islam Hijriyah yang

digunakan secara konsisten di seluruh tanah air. Sejak zaman VOC, dan khususnya pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch menjabat pada awal tahun 1830-an, pemerintah Belanda memiliki kebijakan mewajibkan sekolah agama menjadi sekolah negeri (Shaleh, 2006).

Gubernur Jenderal Van den Capellen mengirim surat kepada Bupati, memberitahu mereka bahwa penting untuk memastikan semua orang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang sama. Ini akan memudahkan mereka untuk mengetahui dan mengikuti hukum negara. Pemerintah menggabungkan departemen yang bertanggung jawab atas pendidikan dan agama, dan kemudian mendirikan sekolah-sekolah agama Kristen di setiap wilayah pemukiman. Tujuannya untuk memudahkan pemerintah Belanda menegakkan hukum bagi semua orang, apapun agamanya (Zuhairini et al., 1995).

Surat edaran menangkap inti dari motivasi di balik pendirian sekolah dasar pada masa itu. Pihak berwenang Belanda melihat tidak ada untungnya mengizinkan umat Islam menjalankan ibadah mereka di tempat-tempat seperti pesantren, masjid, dan musala. Siswa di pesantren secara luas dianggap buta huruf Latin. Akibatnya, undang-undang yang baru diberlakukan tidak jelas bagi siswa.

Menurut Nizar (2007), pendekatan pemerintah Belanda terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam didasarkan pada rasa takut, rasa panggilan agama mereka, khususnya Kristen, dan rasa kolonialisme. Hal inilah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Dengan demikian, mereka mengikuti petunjuk dan kebijakan yang disebutkan di bawah ini:

1. Pada tahun 1882, pemerintah Belanda mendirikan "Priesterraden", sebuah badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Atas saran organisasi ini, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan pada tahun 1905 yang menyatakan bahwa mereka yang memberi instruksi (baca: pengajian) harus mendapat izin terlebih dahulu.
2. Pemerintah Belanda menetapkan pembatasan yang lebih keras lagi terhadap pendidikan Islam pada tahun 1925, dengan menyatakan bahwa tidak semua orang (kyai) diizinkan untuk mengajar. Perundang-undangan ini lahir karena kelompok pendidikan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam (PSI), dan Al-Irsyad semakin banyak jumlahnya.
3. Selain itu, pada tahun 1932 M, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang dikenal dengan Ordonansi Sekolah Liar untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin untuk mengajar atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda. Gerakan Nasionalisme-Islamisme tahun 1928 M mendorong pemerintah untuk mengeluarkan amanat tersebut, yang berupa Sumpah Pemuda.

Jika dicermati betapa ketat dan kerasnya aturan pemerintah Belanda tentang pengawasan, tekanan, dan peniadaan madrasah dan pesantren di

Indonesia, sepertinya pendidikan Islam di Indonesia akan lumpuh dan kacau balau dalam waktu singkat. Tapi apa yang ditunjukkan sejarah justru sebaliknya. Esensi Islam masih hidup dan sehat. Para ulama dan kyai tidak mau bekerja sama dengan Belanda, sehingga mereka meninggalkan tempat-tempat yang dekat dengan Belanda (Zuhairini et al., 1995).

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pendidikan Islam dikenal juga dengan sebutan bumiputera. Hal ini karena yang mengikuti pendidikan Islam hanya orang-orang lokal Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, ada tiga bentuk pendidikan Islam yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih memadukan aspek tradisi pendidikan baik Hindu maupun Islam. itu adalah sistem pendidikan transisi dari Hindu ke Islam. Karena cara pengaturan sistem ini, para pendidik pergi ke kelas masing-masing. anak-anak bangsawan dan istanalah yang akhirnya menjadi teman sekelasnya. Di sisi lain, dalam metode pertapa, murid pergi ke pertapaan instruktur mereka untuk mendapatkan petunjuk. Mengenai murid-muridnya, mereka tidak lagi terbatas pada anggota aristokrasi dan kalangan istana; sebaliknya, mereka juga termasuk anggota populasi biasa.
2. Sistem pendidikan di masjid menggunakan metode yang berbeda dengan sistem pendidikan di sekolah lain. Di sini, siswa belajar berdasarkan tingkat pengetahuan mereka, bukan tingkat kelas mereka. Di masjid, guru membacakan sebuah buku dengan suara keras sementara para siswa mencatat halaman-halaman yang mereka minati. Dengan demikian, siswa dapat lebih memahami informasi tersebut.
3. Sistem pendidikan pondok pesantren menggunakan metode sorogan atau disebut juga dengan pengabdian perorangan. Sistem ini digunakan untuk belajar mengajar, dimana guru hanya berinteraksi dengan siswa yang berada pada level dasar atau sekelompok kecil siswa yang masih berada pada level dasar. Proses operasi standar adalah seorang guru meletakkan buku di depan seorang guru, meminta guru untuk membacakan buku itu dengan suara keras di berbagai tempat, dan kemudian guru membacakannya sekali lagi sampai guru membaca dengan baik. Siswa yang telah menunjukkan penguasaan materi sebelumnya dapat melakukan materi yang sama dengan materi yang baru:
 - a. Baik teknik wetonan maupun bandongan yang sering disebut dengan layanan kelompok merupakan contoh pendekatan pendidikan yang menggunakan format ceramah. Dengan cara ini, kyai akan sering membaca, menerjemahkan, dan kemudian menjelaskan baris-baris sulit dari sebuah buku. Sementara itu, santri akan mendengarkan bacaan ustadz sambil mencatat di pinggir kitab untuk memperjelas apa yang baru saja dibaca.
 - b. Pembelajaran melalui Musyawarah (diskusi) merupakan salah satu contoh pendekatan deliberatif. Tujuan dari Musyawarah ini adalah untuk mengatasi setiap masalah yang terkait dengan bahan pelajaran untuk siswa tingkat tinggi. Metode ini sangat menekankan keterlibatan santri secara aktif dalam proses

pembelajaran; Secara khusus santri dituntut untuk aktif mempelajari dan mengkaji kitab-kitab yang telah dipilih oleh para kiyainya. Kiyai wajib sujud dan memberikan arahan sesuai kebutuhan. (Ramayulis, 2011)

Kurikulum Pesantren menurut Steenbrink dan Rasjidi (1984) kurikulum yang diajarkan di pesantren telah dilakukan sejak akhir abad ke-19. Salah satu pengamat tersebut adalah LWC Van Den Berg (1886), seorang ahli pendidikan dari Belanda. Ia memperumit kitab kuning dengan memasukkan jilid-jilid fikih, baik fikih umum maupun fikih agama, tata bahasa Arab, ushuludin, tasawuf, dan tafsir berdasarkan interaksinya dengan ulama. Hal ini dilakukan agar buku ini lebih komprehensif. Karel A. Steenbrink menarik beberapa kesimpulan dari temuan penelitian Van De Berg. Salah satunya adalah bahwa sebagian besar literatur yang digunakan di pesantren berasal dari Abad Pertengahan di dunia Islam. Pelajaran fikih seringkali mendapat prioritas tertinggi dalam kurikulum pesantren. Terlepas dari kenyataan bahwa instruksi dalam fikih diberikan prioritas, namun topik lain sama sekali tidak diabaikan. Dalam skenario khusus ini, diperlukan topik tentang ilmu alat, penanaman agama, dan akhlak. Kajian bahasa Arab merupakan ilmu pelengkap yang diperlukan untuk memahami berbagai tulisan agama. Pengajaran bahasa Arab dipecah menjadi berbagai subbidang dan tingkatan yang berbeda, yang berfungsi sebagai landasan bagi siswa untuk melanjutkan mempelajari buku. Akibatnya, siswa perlu menguasai bahasa Arab sebelum mereka dapat melanjutkan ke studi teks yang sebenarnya. Kajian teks yang dimaksud mencakup semua tingkatan kajian fikih, dari yang paling mendasar hingga yang paling maju. Buku-buku tentang fikih ini ditulis dalam bahasa Arab. Pemerintah prihatin dengan penyebaran ajaran Islam ekstremis di sekolah-sekolah dan sekitarnya, tetapi itu bukan satu-satunya sumber kekhawatiran. Pemerintah juga mengkhawatirkan penyebaran ajaran Islam ekstremis di luar lingkungan pendidikan tradisional.

Selain itu, mereka percaya bahwa pendidikan Islam memiliki potensi untuk mempengaruhi kurikulum lembaga swasta lainnya. Modifikasi kurikulum dilakukan untuk menyempurnakan pelajaran sebelumnya. Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pengembangan kurikulum dengan menyeimbangkan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak terhindarkan dan kebutuhan siswa yang terus berkembang saat ini (Irawan et al., 2022). Berdasarkan informasi ini, pemerintah Belanda merevisi strateginya untuk menghadapi potensi hasil negatif yang akan dihasilkan dari pertumbuhan jumlah madrasah dan jenis sekolah agama lainnya. Suatu peraturan disahkan pada tanggal 28 Maret 1932, dan dimuat dalam Lembaran Negara nomor 136 dan 260 isinya. Undang-undang ini membatasi kebebasan mengajar bagi instruktur. Tindakan ini diambil sebagai tindakan pencegahan. sekolah swasta. Pertumbuhan institusi pendidikan yang menganut tradisi Islam sama sekali tidak terbantu oleh sistem ini. Bahkan dalam ordonansi yang dikeluarkan pada tahun 1932, disebutkan bahwa semua sekolah yang tidak didirikan oleh pemerintah atau tidak mendapat subsidi dari pemerintah wajib meminta persetujuan sebelum sekolah tersebut dibangun. Ini adalah persyaratan untuk

semua sekolah. Penerapan kebijakan ini oleh pemerintah kolonial Belanda mendapat tanggapan yang tidak biasa dari masyarakat Muslim, khususnya yang berada di Minangkabau. Hal ini disebabkan umat Islam di Minangkabau berkeyakinan bahwa pelaksanaan kebijakan ini akan menghasilkan “sesuatu” yang merugikan Islam. Setelah mendapat tanggapan yang begitu besar, pemerintah Belanda akhirnya menanggapi melalui Gubernur Jendralnya dengan menyatakan bahwa tata cara mengajar di Minangkabau tidak akan diberlakukan lagi dalam waktu dekat. Seiring berjalannya waktu, terlihat jelas bahwa kebijakan tata cara guru tidak efektif; akibatnya, dihapus dan dikeluarkan dari peredaran. Seharusnya sebelum kebijakan tersebut diterapkan seharusnya dilakukan sebuah pembinaan dan pengawasan, Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pimpinan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja para guru di madrasah adalah melakukan pengawasan dan supervisi dengan menggunakan metode dan formulasi yang tepat (Hasan & Anita, 2022). Walaupun Belanda berusaha meyakinkan beberapa penguasa Islam di Minangkabau untuk mendukung pelaksanaan undang-undang ini, mereka tidak berhasil (Ramayulis, 2011).

KESIMPULAN

Esensi pendidikan Islam pada masa pendudukan Belanda dapat dipahami dari uraian makalah yang disajikan di atas. Tulisan ini menjelaskan bahwa pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda sangat membatasi kegiatan madrasah dan guru yang mengajar di madrasah. Pada masa itu pendidikan Islam sangat dibatasi. Mereka bertindak demikian karena mereka takut terhadap umat Islam yang baru saja mulai berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Sulistyono. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta : Penaku.
- Hasan, M., & Anita, A. (2022). Implementasi Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi Dan Kinerja Guru Di MA Al Ishlah Natar Dan MA Mathlaul Anwar Cinta Mulya. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 85–97.
- Irawan, M. N. L., Yasir, A., Anita, A., & Hasan, S. (2022). Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4273–4280.
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nizar, S. (2007). *Sejarah pendidikan Islam : menelusur jejak sejarah pendidikan era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramayulis. (2011). *Sejarah pendidikan Islam : perubahan konsep, filsafat dan metodologi dan era nabi SAW sampai ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia.

- Shaleh, Rahman A. (2006). *Madrasah dan pendidikan anak bangsa : visi, misi dan aksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Steenbrik, & Rasjidi, K. A. (1984). *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subhan, A. (2012). *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20 : Pergumulan antara modernisasi dan identitas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yunus, M. (1992). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Zuhairini, Kasiram, M., Ghofir, A., Fadjar, A. M., & Umar, H. M. (1995). *Sejarah pendidikan islam* (Cet. 4). Jakarta: Bumi Aksara.